



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

THE EFFECT OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUES, GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON REGIONAL EXPENDITURES OF DISTRICT/ CITY GOVERNMENTS IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

Finalianti Roskaputri^{1*}, Haryono², Elok Heniwati³

Universitas Tanjungpura

***Email Correspondence:** finaliantiroskaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah guna mengetahui kontribusi dari faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah seperti dari ketiga jenis dana tersebut. Data penelitian ini diperoleh oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan data pendukung dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018-2022. Dengan menggunakan Eviews 12, penelitian ini menggunakan regresi data panel sebagai teknik analisis. Regresi data panel menunjukkan bahwa *Common Effect Model* merupakan model paling terbaik yang ditemukan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak dipengaruhi oleh Belanja Daerah. Sementara itu, secara simultan Belanja Daerah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah

ABSTRACT

This study aims to test and identify the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Expenditure in order to determine the contribution of factors that affect regional expenditure such as the three types of funds. The data for this study were obtained by the Regional Finance and Assets Agency of West Kalimantan Province and supporting data from the website of the Directorate General of Fiscal Balance covering 14 districts/cities in West Kalimantan Province in 2018-2022. Using Eviews 12, this research uses panel data regression as an analysis technique. Panel data regression shows that the Common Effect Model is the best model found in this study. The research findings show that there is an influence of Regional Original Revenue and Special Allocation Fund on Regional Expenditure. Meanwhile, simultaneously, Regional Expenditure in all districts/cities of West Kalimantan Province is positively and significantly influenced by Local Own Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di daerah-daerah terutama dalam hal pembangunan, menuntut alokasi dana yang signifikan dari pemerintah daerah, terutama untuk kepentingan yang menjurus pada konteks pengeluaran secara rutin dan skala prioritas yang lekat dengan

kategorisasi pembangunan untuk operasional pemerintahan (Silvani, 2016). Diperlukan keseimbangan antara peningkatan pengeluaran belanja daerah dengan penerimaan dana agar dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005



menjelaskan bahwasannya belanja daerah berguna dalam membiayai implementasi tugas dari pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas-tugas ini termasuk tugas wajib dan tugas pilihan yang ditetapkan secara hukum. Pendapatan keseluruhan yang diperoleh pemerintah daerah menentukan bagaimaa pengeluaran didistribusikan di tingkat daerah. Pendapatan yang dimaksud meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut pernyataan penanggung jawab Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos.M.Si saat menghadiri Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah se-

Kalimantan Barat di Kantor Bupati Sambas pada tanggal 22 November 2023 menyampaikan bahwa dikarenakan pendapatan awal daerah Provinsi Kalimantan Barat masih kurang dari kebutuhan belanja daerah, pemerintah daerah provinsi tersebut masih bersandar pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan. Jika pendapatan asli daerah suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut dapat digolongkan sebagai daerah maju. Peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Astutiawaty et al., 2022). Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	PAD	DAU	DAK	BD
2018	2.194.867.823.990	1.724.402.496.000	1.508.354.941.593	5.341.404.834.196
2019	2.301.306.937.991	1.756.069.684.000	1.686.329.825.943	5.667.397.310.139
2020	2.154.145.653.806	1.563.770.887.000	1.765.789.158.048	4.934.552.187.643
2021	2.507.322.119.826	1.572.247.838.000	1.860.151.882.072	5.156.492.788.186
2022	3.217.812.121.331	1.553.304.284.810	846.757.213.415	4.547.369.876.130

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Barat

Pada Tabel 1 diatas menunjukkan peningkatan tahunan dalam Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah khususnya di tahun 2022, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah meningkat secara signifikan. Perbandingan yang jauh antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah memperlihatkan bahwa meskipun mengalami peningkatan disetiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, dapat diamati pada Dana Alokasi Umum mengalami fluktuasi disetiap tahunnya

dan Dana Alokasi Khusus naik pada setiap tahunnya. Namum, pada tahun 2022 Dana Alokasi Khusus menurun. Agar dapat menggunakan uang transfer dari pemerintah pusat untuk membayar pengeluaran daerah mereka sendiri, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk mereka.

Penelitian sebelumnya yang dibuat oleh (Fernandes & Fauzia, 2022) menegaskan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terkait



Belanja Daerah. Akan tetapi, pada penelitian Ariyanti et al. (2023) menerangkan hasil temuannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh terkait Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terkait Belanja Daerah. Penelitian ini sering kali menghasilkan temuan yang beragam dan tidak selalu konsisten satu sama lain, sehingga menciptakan kesenjangan dalam hasil penelitian. Hal ini mendorong penulis untuk mengevaluasi dan menguji kembali mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja daerah, dengan mempertimbangkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah studi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Zelmianti (2016) Teori keagenan merujuk pada perjanjian antara prinsipal dan agen. Pada hal ini, prinsipal mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan instruksi, mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap tugas yang dilaksanakan oleh agen. Sedangkan agen yakni pihak yang menerima tugas serta bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan kehendak prinsipal (Nugraha & Dwirandra, 2016). Terkait penelitian ini, pembagian dana perimbangan sebagai korelasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu teori keagenan ini. Pemerintah daerah dapat mengatur sebagian besar urusan pemerintah secara mandiri

setelah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada mereka. Setelah pelimpahan wewenang, untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah dan meningkatkan layanan publik, pemerintah pusat menyediakan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD didefinisikan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penghasilan yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak, retribusi, pengelolaan harta kekayaan yang telah dibagi, serta tambahan penghasilan yang diperbolehkan secara sah. Penerimaan ini dimaksudkan agar daerah dapat menambah modal dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai salah satu aspek desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Masih sama dalam payung hukum yakni DAU yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disalurkan agar memenuhi kebutuhan daerah akan desentralisasi pemerintahan dan alokasi sumber daya keuangan yang adil di semua bidang. Dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN. Jumlah DAU yang diterima menunjukkan tingkat kebutuhan dan kemampuan setiap daerah dalam potensi penerimaannya. Daerah dengan kemampuan yang tinggi memiliki DAU yang rendah, dan daerah dengan kemampuan yang lebih rendah memiliki DAU yang lebih tinggi (Dewi, 2017).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah melalui DAK sehingga mereka dapat mendukung proyek tertentu. Undang-Undang

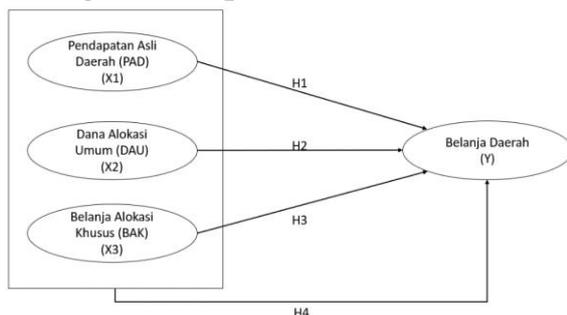


Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DAK merupakan uang yang dialokasikan kepada daerah tertentu dari pendapatan APBN dalam rangka mendukung proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab daerah dan mencapai tujuan nasional. Dengan menjadikan penyediaan infrastruktur fisik sebagai prioritas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berupaya mengkoordinasikan pelayanan lintas sektor dan pertumbuhan ekonomi.

Belanja Daerah

Belanja daerah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai setiap komitmen daerah yang menurunkan nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berjalan. Menurut Baldrick (2015) secara ringkas, belanja daerah adalah pengeluaran pada rekening kas umum daerah yang dimana pengeluaran tersebut dapat menyebabkan kerugian saldo anggaran yang berlebihan atau bahkan menurunkan nilai aset bersih dalam tahun anggaran yang ditentukan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Salah satu jenis pendapatan daerah yang dihasilkan dari potensi daerah dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Dengan memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan infrastruktur yang memadai, tingkat produktivitas masyarakat yang tinggi akan berdampak pada PAD. Dana yang dimiliki pemerintah daerah dapat meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang berarti kemampuan mereka untuk mengeksplorasi lebih banyak sumber daya akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan belanja daerah akan meningkat sejalan dengan peningkatan PAD (Devita et al., 2014 dalam Fatimah et al., 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah pada penelitian Septriani (2023) yang meneliti di Provinsi Bengkulu mengindikasikan adanya dampak positif terhadap PAD dan Belanja Daerah. Penemuan serupa juga dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rohana & Asoka (2021), Fernandes & Fauzia (2022), dan Ariska et al. (2022). Berdasarkan pemahaman tersebut, hipotesis penelitian:

H_1 : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

DAU dalam pengelompokkannya yakni bagian kecil dari total APBD. Dengan dana transfer ini, penerimaan belanja daerah untuk memenuhi semua layanan masyarakat dan pembangunan daerah akan meningkat. Selain itu, aka nada tujuan pemerataan dengan mempertimbangkan kondisi sekitar, yang akan memperkecil perbedaan antara daerah maju dan belum berkembang. Pemerintah daerah akan mendorong pengembangan terus-menerus dengan menggunakan belanja daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembayaran pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk dalam DAU dan



digunakan buat mengakomodasi kepentingan daerah sebagai komponen dari belanja daerah, maka DAU yang tinggi berarti peluang yang lebih besar untuk memenuhi belanja daerah (Rafi & Arza, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada penelitian Rafi & Arza (2023) yang mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah. Penemuan serupa juga dilakukan oleh Astuti & Mildawati (2019), Iqbal et al. (2020), dan Mbuvinga et al. (2022). Berdasarkan pemahaman tersebut, hipotesis penelitian:

H_2 : *DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah*

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

DAK dialokasikan agar dapat memenuhi kebutuhan daerah yang menjadi prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi serta infrastruktur. Khususnya dana ini dialokasikan untuk membiayai pengadaan fasilitas dan infrastruktur layanan masyarakat yang tidak memenuhi atau mendorong pertumbuhan regional yang lebih cepat. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana ini untuk memenuhi layanan kepada masyarakat. DAK juga berfungsi sebagai dana transfer yang mendukung realisasi Belanja Daerah. Belanja Daerah yang digunakan untuk pendanaan daerah berhubungan erat terhadap DAK. Oleh karena itu, diperkirakan belanja daerah akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada penelitian yang dilakukan oleh Ikhvani et al.

(2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Penemuan ini serupa dengan hasil yang dilakukan oleh Joko et al. (2017), Rasyid (2018), dan Zefania Mangiring Silaen (2019). Berdasarkan pemahaman tersebut, hipotesis penelitian:

H_3 : *DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah*

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Sumber daya keuangan pemerintah daerah ditentukan dari kapasitas daerah dalam menjalankan kewajibannya (Mamuka & Elim, 2014). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Belanja daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan PAD. Tingkat kemandirian suatu wilayah dapat diukur dengan menggunakan dana alokasi umum. Peningkatan belanja daerah akan diikuti oleh peningkatan DAU. Selain itu, sebagai komponen dari pendapatan daerah, dana alokasi khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja, tetapi hanya kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus harus digunakan secara proporsional dengan besarnya belanja daerah.

Dalam penelitian sebelumnya terkait pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah yang dilakukan oleh (Rohana & Asoka, 2021), (Edwin et al., 2020) dan (Iqbal et al., 2020) menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, hipotesis penelitian:

H_4 : *PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah*



METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi secara objektif dengan menggunakan angka (Septriani, 2023). Penelitian ini mengambil data sekunder yang didapatkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta dari web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai data pendukung. Data tersebut memuat data realisasi PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah pada tahun 2018-2022 di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi APBD. Populasi penelitian adalah data realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja daerah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022. Teknik sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik *full sampling* atau sampel jenuh, seluruh populasi digunakan sebagai sampel (Rusmita, 2016).

Analisis regresi pada data panel diaplikasikan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016) data Panel terdiri dari beberapa objek sepanjang kurun waktu tertentu yang dimana merupakan gabungan data antara *time series* dengan *cross section*. Kurun waktu penelitian ini dilaksanakan dari 2018-2022 (*time series*) dan objeknya adalah 14 Kabupaten/Kota (*Cross Section*) sehingga totalnya adalah sebanyak 70 data observasi. Persamaan regresi data panel yaitu:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- BD : Belanja Daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi dari variabel independen
- ε : error term
- i : Unit Cross section (kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat)
- t : Periode waktu (*Data Time Series* tahun 2018-2022).

Menurut (Basuki & Prawoto, 2019) dalam data panel ada sejumlah model, meliputi *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk model terbaik berdasarkan ketiga model data panel yang telah disebutkan sebelumnya dan dapat dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Dan untuk uji hipotesisnya terdiri dari uji -t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2). Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	70	11.975.381.526	537.797.747.855	129.129.319.73	107.606.184.604
DAU	70	99.291.004.000	1.149.675.669.000	680.725.758.84	197.769.991.786
DAK	70	51.190.450.816	486.448.335.858	227.286.054.60	98.227.418.417



BD 70 335.275.931.673 2.366.359.901.597 1.237.116.269.81 461.354.649.005
Valid N
(listwise)

Sumber: *Output Eviews 12 (diolah, 2024)*

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa ada 70 data yang diperhatikan. Data Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa ada nilai minimum 11.975.381.526 yang datanya terdapat di Kabupaten Melawi 2021, sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah maksimum adalah 537.797.747.855 yang datanya terdapat di Kota Pontianak 2022. Rata-rata (mean) Pendapatan Asli Daerah adalah 129.129.319,73 dan standar deviasinya 107.606.184.604. Kemudian data Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa memiliki nilai minimum 99.291.004.000 yang terdapat di Kabupaten Mempawah 2019, sedangkan nilai Dana Alokasi Umum maksimum adalah 1.149.675.669.000 yang terdapat di Kabupaten Ketapang 2019. Rata-rata (mean) Dana Alokasi Umum adalah 680.725.758,84 dan standar deviasinya 197.769.991.786. Dan pada data Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa nilai minimum yang didapat adalah 51.190.450.816 yang terdapat di Kabupaten Mempawah 2019, sedangkan nilai Dana Alokasi Khusus maksimum adalah

486.448.335.858 yang datanya terdapat di Kabupaten Ketapang 2019. Rata-rata (mean)

Dana Alokasi Khusus adalah 227.286.054,60 dan standar deviasinya 98.227.418.417. Pada variabel penelitian Belanja Daerah menunjukkan bahwa memiliki nilai minimum 335.275.931.673 yang datanya terdapat di Kabupaten Sanggau 2020, sedangkan nilai Belanja Daerah maksimum adalah 2.366.359.901.597 yang datanya terdapat di Kabupaten Ketapang 2022. Rata-rata (mean) Belanja Daerah adalah 1.237.116.269.81 dan standar deviasinya 461.354.649.005.

Pengujian Kelayakan Model Regresi Panel Uji Chow

Dengan tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$. Uji chow ini berfungsi dalam menentukan model yang terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Hasil uji chow bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.064024	(13,53)	0.4089
Cross-section Chi square	16.232630	13	0.2368

Sumber: *Output Eviews 12 (diolah, 2024)*

Berdasarkan Tabel 3 diatas, didapat nilai Probability Chi Square sebesar 0.2368, lebih tinggi dari tingkat toleransi kesalahan penelitian yaitu α (0,05). Sehingga, hasil uji chow menunjukkan bahwa *common effect model* adalah model terbaik. Oleh karena itu,

diperlukan uji lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik lagi antara *common effect model* dan *random effect model* (Rifkhan, 2022).



Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.738106 (0.3903)	6.216982 (0.0127)	6.955087 (0.0084)

Sumber: Output Eviews 12 (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4 diatas, terlihat bahwa nilai prob. Breusch-Pagan sebesar (0.3903) lebih besar dari α (0,05). Oleh karena itu, model yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah *common effect model*.

Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih pada penelitian ini adalah *common effect model* (CEM), sehingga uji asumsi klasik harus digunakan. Uji asumsi klasik pada data panel ini cukup uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2019).

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

	PAD	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.313007	0.252552
DAU	0.313007	1.000000	0.809480
DAK	0.252552	0.809480	1.000000

Sumber: Output Eviews 12 (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, memperlihatkan koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $0,313007 < 0,85$, X1 dan X3 sebesar $0,252552 < 0,85$, dan X2 dan X3 sebesar $0,809480 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas (Napitupulu et al., 2021).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis : Homoskedasticity			
F-statistic	0.582118	Prob. F(3,65)	0.6289
Obs*R-squared	1.805318	Prob. Chi-Square(3)	0.6138
Scaled explained SS	2.262332	Prob. Chi-Square(3)	0.5198

Sumber: Output Eviews 12 (diolah, 2024)

Terlihat dari Tabel 6 di atas bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam

penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Regresi Data Panel (*Common Effect Model*)**

Hasil penentuan model menunjukkan bahwa *Common Effect Model* adalah model yang paling tepat untuk diestimasi pada

penelitian ini. Hasil regresi untuk *Common Effect Model* (CEM) dapat dilihat pada tabel 7. sebagai berikut:

Tabel 7. Regresi Data Panel (*Common Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.02E+11	1.09E+11	1.861814	0.0671
PAD	1.782662	0.289870	6.149874	0.0000
DAU	0.430831	0.259908	1.657627	0.1021
DAK	2.248340	0.513652	4.377162	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12 (diolah, 2024)*

Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka persamaan regresi yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = 2.02628039927 + 1.78266162PAD_{it} + 0.430831DAU_{it} + 2.248340DAK_{it}$$

Pengujian Hipotesis Penelitian**Uji -t****Tabel 8. Uji -t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	t-tabel	Prob.	Alpha
PAD	1.782662	0.289870	6.149874	1,66691	0.0000	0,05
DAU	0.430831	0.259908	1.657627	1,66691	0.1021	0,05
DAK	2.248340	0.513652	4.377162	1,66691	0.0000	0,05

Sumber: *Output Eviews 12 (diolah, 2024)*

Berdasarkan Tabel 8, didapatkan hasil nilai t-hitung pada variabel PAD sebesar 6.149874, dimana hasil tersebut lebih besar daripada nilai t tabel 1,66691. Nilai probabilitas PAD adalah 0.0000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya yaitu PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, pada uji hipotesis kedua, nilai t-hitung pada variabel penelitian DAU adalah 1.657627 yang dimana lebih besar daripada nilai t tabel 1,66691. Nilai

probabilitas DAU yang didapat sebesar 0.1021 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_2 ditolak dan H_0 diterima sehingga kesimpulannya adalah bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Terakhir pada uji hipotesis ketiga, nilai t-hitung untuk variabel penelitian DAK adalah 4.377162 yang jauh lebih besar daripada t tabel 1,66691. Nilai probabilitas DAK adalah 0.0000 kurang dari 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga



kesimpulannya adalah DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Uji F

Tabel 9. Uji F

F-statistic	58.84448
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 12 (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 9 di atas, nilai f hitung sebesar $58,84448 > f$ table yaitu $2,74$ dan nilai $\text{sig } 0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.727873
Adjusted R-squared	0.715503

Sumber: Output Eviews 12 (diolah, 2024)

Adjusted R-squared sebesar $0,715503$ ($71,5\%$) yang artinya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variable independent yang meliputi PAD, DAU, dan DAK dapat menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah sebesar $71,5\%$ sedangkan sisanya yaitu $28,5\%$ ($100 - \text{nilai adjusted R Square}$) dijelaskan oleh variable lain yang tidak tercakup dalam model studi ini.

Hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Merujuk hasil uji $-t$, ditunjukkan bahwa nilai probabilitas t -statistik ($0.000 < \alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut didapatkan hasil secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septriani (2023), Rohana & Asoka (2021), Fernandes & Fauzia (2022), dan Ariska et al. (2022) yang mengungkapkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa jika tingkat PAD naik, maka pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat akan menaikkan belanja daerahnya. Pendapatan asli daerah mempunyai dampak terhadap struktur belanja daerah (Budiarti, 2016). Pengeluaran di wilayah ini meningkat ketika terjadi aktivitas yang tidak terduga atau luar biasa. Sebab, uang tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu terus memaksimalkan pendapatan awal daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Merujuk pada hasil uji t dalam penelitian ini, dilihat bahwa nilai probabilitas t -statistik ($0.1021 > \alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hal ini sejalan dengan penelitian Nur (2015), Rusmita (2016), Firdayanti & Hidayat (2019), dan Sofiyani & Subadriyah (2020).

Salah satu aspek dalam APBD adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang



dialokasikan untuk mendukung kebutuhan yang dimiliki pemerintah daerah secara umum dan bukan hanya untuk meningkatkan belanja daerah. Akibatnya, DAU mempunyai dampak langsung yang kecil terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Merujuk pada hasil uji t, ditunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik ($0.0000 < \alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan et al. (2019), Joko et al. (2017), Rasyid (2018), dan Zefania Mangiring Silaen (2019) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Besarnya alokasi belanja daerah meningkat seiring dengan besarnya Dana Alokasi Khusus. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut akan sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, rendahnya Dana Alokasi Khusus menunjukkan kemandirian daerah yang lebih besar dikarenakan daerah dapat mendanai kebutuhan pembangunan dari pendapatan daerah. Peningkatan belanja pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat juga dapat dikaitkan dengan peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk daerah tersebut oleh pemerintah pusat.

Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pada Tabel 9 di atas menunjukkan nilai F hitung sebesar 58,84448

dan signifikan sebesar $0.000000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rohana & Asoka, 2021), (Edwin et al., 2020) dan (Iqbal et al., 2020). Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah secara bersama-sama. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis regresi data panel dan perangkat lunak pengolahan data Eviews 12 yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara nyata. Selanjutnya, secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi belanjanya dengan melakukan hal-hal seperti memanfaatkan kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, untuk menyalurkan dana ke sektor publik, pemerintah daerah harus terus berupaya



mengamankan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerapannya harus semakin fokus dan efektif dengan cara ini. Saran bagi peneliti berikutnya dapat menggunakan faktor-faktor yang lebih luas dengan memasukkan variabel-variabel independen lain yang lebih memberikan kontribusi kepada belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, M., Yani, R., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 6(2), 121–128. <https://doi.org/10.33059/jensi.v6i2.6455>
- Ariyanti, D., Nelly Masnila, & Choiruddin. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Pulau Sumatera. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(6), 2174–2189. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.421>
- Astuti, L. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10). <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 242–262.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews). In *PT Rajagrafindo Persada, Depok* (Vol. 18).
- Budiarti, P. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2).
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i2.2255>
- Dewi, S. R. (2017). Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Journal of Accounting Science*, 1(2), 155–174. <https://doi.org/10.21070/jas.v1i2.956>
- Edwin, M. Y., Daisy, E. S. M., & Debby, R. C. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(2), 76–93.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>



- Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2017-2020. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 187–197.
<https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.101>
- Firdayanti, F., & Hidayat, M. T. (2019). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 49–66.
- Ikhwan, N., Naz'Aina, & Ratna. (2019). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Manajemen Indonesia*, 4(2), 111–123.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Manajemen Indonesia*, 5(2), 1–13.
<https://doi.org/10.52062/keuda.v5i3.1536>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
<https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Joko, U., Tri, W., & Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*, 1(2).
- Mamuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 646–655.
- Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203–3213.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). Penelitian Bisnis : Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS. In *Madenatera* (Vol. 1).
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=T1nJQ0cAAAAJ&citation_for_view=T1nJQ0cAAAAJ:D03iK_w7-QYC
- Nugraha, I. P. B. I. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 284–311.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap



- Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan. *Jurnal ASSETS*, 5(1), 82.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 411–427.
- Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5), 68–80.
- Rohana, S., & Asoka, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 39–49.
<https://doi.org/10.35449/surplus.v1i1.366>
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(3), 237.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19>
- 083
- Septriani. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(3), 884–894.
- Silvani. (2016). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 3(2), 5–24.
- Sofiyani, L., & Subadriyah. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 4(1), 33–47.
<http://lib.unnes.ac.id/17688/1/7250407094.pdf>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Zefania Mangiring Silaen. (2019). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karo* (Vol. 44, Nomor 2).
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.